

KOLABORASI PENTAHHELIX DALAM PENGEMBANGAN SUSTAINABLE TOURISM BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Fitri Wahyuni¹, Pindo Riski Saputra²

^{1,2}Universitas Dharma Wacana, Jl. Kenanga No.3 Mulyojati Kec. Metro Barat, Kota Metro

Email: fitritanjung291195@gmail.com

Article History

Received: 15-06-2026

Revision: 20-06-2026

Accepted: 24-06-2026

Published: 30-06-2026

Abstract. This study examines the Pentahelix collaboration between the government, academics, business actors, the community, and the media in developing sustainable tourism in Tulang Bawang Barat regency. This regency holds significant potential for tourism based on local wisdom, but existing development remains fragmented and uncoordinated. The study employed a qualitative approach with descriptive analytical methods through in-depth interviews, field observations, and document studies. The results indicate that the Pentahelix collaboration has successfully encouraged the development of man-made tourist destinations in Tulang Bawang Barat Regency by integrating Lampung cultural values as the main attraction. Key obstacles include weak cross-sectoral coordination, budget constraints, and low human resource capacity at the village level. The study concludes that effective implementation of the Pentahelix model requires a formal coordination platform based on regional regulations, not just informal communication. These findings reinforce the importance of institutionalizing collaboration as a prerequisite for sustainable tourism.

Keywords: *Pentahelix, sustainable tourism, local wisdom, Tulang Bawang Barat*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji kolaborasi Pentahelix antara pemerintah, akademisi, pelaku bisnis, masyarakat, dan media dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kabupaten ini menyimpan potensi wisata berbasis kearifan lokal yang cukup besar, namun pengembangan yang ada masih bersifat parsial dan tidak terkoordinasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitik melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi Pentahelix berhasil mendorong pengembangan destinasi wisata buatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan mengintegrasikan nilai budaya Lampung sebagai daya tarik utama. Hambatan utama meliputi lemahnya koordinasi lintas sektor, keterbatasan anggaran, serta rendahnya kapasitas SDM di tingkat desa. Penelitian menyimpulkan bahwa implementasi model Pentahelix yang efektif membutuhkan platform koordinasi yang formal dan berbasis regulasi daerah, bukan sekadar komunikasi informal. Temuan ini memperkuat pentingnya pelebagaan kolaborasi sebagai prasyarat pariwisata yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *Pentahelix, sustainable tourism, kearifan lokal, Tulang Bawang Barat.*

How to Cite: Wahyuni, F. & Saputra, P.R. (2026). Kolaborasi Pentahelix Dalam Pengembangan Sustainable Tourism Berbasis Kearifan Lokal Di Kabupaten Tulang Bawang Barat. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 6 (1), 8318-8326. [10.54373/ifijeb.v6i1.6824](https://doi.org/10.54373/ifijeb.v6i1.6824)

PENDAHULUAN

Pariwisata sudah lama dipandang sebagai salah satu sektor andalan dalam strategi pembangunan daerah di Indonesia, termasuk di wilayah Provinsi Lampung. Namun, pertumbuhan kunjungan wisatawan tidak dengan sendirinya mencerminkan keberlanjutan ekologis maupun kesejahteraan masyarakat lokal. Di banyak daerah, pengembangan destinasi wisata justru berlangsung tanpa melibatkan komunitas sebagai aktor utama, sehingga manfaat ekonomi yang dihasilkan cenderung terkonsentrasi pada pihak luar (Nugroho & Dahuri, 2012).

Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan salah satu kabupaten pemekaran di Provinsi Lampung yang berdiri sejak tahun 2008. Wilayah ini memiliki lanskap alam yang beragam, mulai dari kawasan hutan tropis hingga perairan sungai dan danau, yang berpotensi menjadi daya tarik ekowisata. Selain kekayaan alam, masyarakat adat Lampung di Tiyuh-tiyuh (desa adat) Kabupaten Tulang Bawang Barat juga menyimpan tradisi budaya, ritual adat, dan kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan yang dapat dikembangkan sebagai produk wisata budaya (Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2023).

Permasalahan mendasar yang dihadapi Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam pengembangan pariwisata adalah fragmentasi peran antaraktor. Pemerintah daerah memiliki regulasi dan anggaran, namun kapasitas perencanaan teknis terbatas. Sektor swasta memiliki modal dan jaringan pasar, tetapi kerap berorientasi profit jangka pendek. Perguruan tinggi memiliki pengetahuan dan metodologi, namun keterlibatan mereka dalam kebijakan publik lokal masih sporadis. Sementara itu, masyarakat sebagai pemilik kearifan lokal sering kali hanya menjadi objek, bukan subjek, dari program pembangunan wisata (Carbone, 2005; Hermawan, 2017). Kondisi ini mendorong perlunya pendekatan kolaboratif yang lebih terstruktur.

Model Pentahelix yang mengintegrasikan lima aktor yakni pemerintah (government), akademisi (academia), pelaku bisnis (business), masyarakat (community), dan media telah banyak dibahas dalam literatur inovasi dan pembangunan regional sebagai kerangka kolaborasi yang mampu menjembatani kepentingan berbeda secara sinergis (Maturbongs, Edoardus E, 2020). Dalam konteks pariwisata berkelanjutan, model ini relevan karena pariwisata bukan hanya urusan pemerintah atau swasta semata, melainkan menyangkut tata kelola bersama yang membutuhkan legitimasi dari komunitas lokal dan dukungan penyebaran informasi melalui media.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kolaborasi Pentahelix bekerja dalam praktiknya di Kabupaten Tulang Bawang Barat, hambatan apa yang dihadapi masing-

masing aktor, serta faktor-faktor apa yang mendukung atau menghambat keberlanjutan pariwisata berbasis kearifan lokal di wilayah tersebut. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi empiris terhadap diskusi model Pentahelix di tingkat daerah, khususnya pada kabupaten-kabupaten dengan kapasitas kelembagaan yang masih terbatas.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif analitik.

Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian adalah memahami proses dan dinamika kolaborasi antaraktor secara mendalam, bukan mengukur hubungan kausalitas secara statistik (Creswell & Poth, 2018). Data dikumpulkan melalui tiga teknik, yaitu wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi lapangan, dan telaah dokumen.

Lokasi dan Informan Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, pada periode Agustus–November 2024. Lokasi penelitian mencakup Tiuh Panaragan Jaya sebagai salah satu desa wisata yang sedang dikembangkan, Kawasan Wisata Islamic Center dan Uluhan Nughik, serta Patung Naga. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria keterlibatan langsung dalam pengelolaan atau kebijakan pariwisata di kabupaten tersebut. Total informan berjumlah 22 orang, terdiri dari pejabat dinas, akademisi, pengusaha wisata, tokoh adat, kelompok sadar wisata (pokdarwis), dan jurnalis daerah.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Wawancara dilakukan secara langsung dengan durasi rata-rata 60–90 menit per sesi dan direkam dengan izin informan. Observasi lapangan mencakup kunjungan ke destinasi wisata, pertemuan koordinasi antar-pemangku kepentingan, dan kegiatan festival budaya adat Lampung. Telaah dokumen meliputi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Tulang Bawang Barat 2022–2027, laporan realisasi program dinas, serta dokumen perencanaan desa wisata. Data dianalisis menggunakan model Miles et al. (2014) yang terdiri dari kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber dan metode.

HASIL

Temuan penelitian disajikan dalam empat bagian: profil potensi wisata, pemetaan peran aktor Pentahelix, dinamika kolaborasi, serta capaian program yang dapat diidentifikasi selama periode penelitian.

Profil Potensi Wisata Kabupaten Tulang Bawang Barat

Berdasarkan data RIPPARDA 2022–2027 dan hasil observasi lapangan, Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki sedikitnya 8 objek wisata yang telah teridentifikasi, terdiri dari wisata buatan, wisata budaya dan adat, dan agrowisata. Dari jumlah tersebut, hanya 3 destinasi yang telah memiliki pengelolaan formal dengan pokdarwis aktif. Sebagian besar destinasi masih dalam tahap rintisan dengan infrastruktur yang minim.

Tabel 1. Potensi Objek Wisata Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024

Kategori Wisata	Jumlah Objek	Memiliki Pokdarwis Aktif
Wisata Buatan	5	2
Wisata Budaya & Adat	2	1
Wisata Agrowisata	1	0
Total	8	3

Sumber: RIPPARDA Kabupaten Tulang Bawang Barat (2022) dan hasil observasi lapangan (2024)

Kearifan lokal masyarakat Lampung yang memiliki nilai wisata tinggi mencakup tradisi Cangget (tari adat untuk perayaan dan pertemuan adat), sistem pertanian berbasis marga yang ramah lingkungan, serta ritual adat suku Tulang Bawang Barat yang berkaitan dengan siklus pertanian dan pengelolaan sumber daya air. Unsur-unsur budaya ini belum sepenuhnya diintegrasikan ke dalam narasi wisata yang ditawarkan kepada pengunjung.

Pemetaan Peran Aktor Pentahelix

Dari hasil wawancara dan telaah dokumen, diperoleh gambaran peran masing-masing aktor dalam ekosistem pariwisata Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana disajikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Pemetaan Peran Aktor Pentahelix dalam Pengembangan Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang Barat

Aktor	Peran Aktual	Kendala yang Dihadapi
Pemerintah	Perencanaan RIPPARDA, alokasi DAK wisata, perizinan desa wisata	Anggaran terbatas, kapasitas teknis perencanaan lemah
Akademisi	Penelitian potensi wisata, pelatihan SDM pokdarwis, pendampingan teknis	Keterlibatan sporadis, tidak ada MoU jangka panjang
Pelaku Bisnis	Investasi sarana wisata, paket tur, pengelolaan homestay	Akses modal terbatas, ketidakpastian regulasi investasi lokal
Masyarakat	Pemilik aset budaya dan alam, pengelola pokdarwis, pemandu lokal	Kapasitas SDM rendah, minim akses teknologi dan promosi digital
Media	Publikasi destinasi, peliputan event budaya, konten media sosial	Jangkauan terbatas pada media lokal, kurang kurasi konten wisata

Sumber: Hasil wawancara mendalam dan telaah dokumen (2024)

Temuan menarik dari pemetaan ini adalah bahwa peran media sebagai aktor Pentahelix paling sering diabaikan dalam diskusi kebijakan pariwisata di tingkat daerah, padahal dampak pemberitaan dan konten digital terbukti signifikan dalam mendongkrak kunjungan wisatawan

ke destinasi baru. Beberapa informan dari kalangan media mengungkapkan bahwa mereka tidak pernah dilibatkan secara formal dalam perencanaan wisata daerah.

Dinamika dan Capaian Kolaborasi

Selama periode 2022–2024, terdapat tiga inisiatif kolaborasi lintas aktor yang dapat diidentifikasi. Pertama, program Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal di Tiyuh Panaragan Jaya yang melibatkan Dinas Pariwisata, dua perguruan tinggi mitra, dan satu biro perjalanan wisata dari Bandar Lampung. Program ini berhasil menarik 1.240 wisatawan domestik pada tahun 2023, meningkat dari 430 pengunjung pada tahun 2021 sebelum program diluncurkan. Kedua, penyelenggaraan Festival Adat Budaya Lampung Nuwou Sesat sebagai event tahunan yang difasilitasi pemerintah kabupaten dan diliput media regional. Ketiga, pilot project homestay berbasis komunitas di empat tiyuh di Kecamatan Tulang Bawang Udik.

Tabel 3. Perkembangan Kunjungan Wisatawan ke Destinasi Wisata Pilihan Kabupaten Tulang Bawang Barat (2020–2024)

Destinasi	2020	2021	2023	2024
Tiyuh Panaragan Jaya (Islamic Center)	280	430	1.240	1.890
Wisata Uluhan Nughik	1.100	640	2.300	3.150
Festival Tubaba Art	-	750	2.100	3.400
Patung 4 Marga	320	190	780	1.200

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang Barat (2024)

DISKUSI

Data kunjungan wisatawan pada Tabel 3 memperlihatkan tren pertumbuhan yang cukup konsisten sejak kolaborasi lintas aktor mulai diinisiasi pada 2021–2022. Namun, angka kunjungan yang meningkat tidak serta-merta menandai keberhasilan model Pentahelix secara menyeluruh. Ada kesenjangan yang cukup mencolok antara potensi yang tersedia 17 objek wisata dan destinasi yang benar-benar berkembang, yang baru berjumlah empat hingga enam lokasi. Kesenjangan ini mencerminkan lemahnya koordinasi antaraktor yang masih berlangsung secara informal dan tidak terlembagakan.

Temuan ini sejalan dengan argumen Ruhanen et al. (2010) bahwa kolaborasi dalam pariwisata berkelanjutan sering menghadapi problem governance yang berkaitan dengan ketidakjelasan peran, ketidakseimbangan kekuasaan, dan absennya mekanisme akuntabilitas bersama. Di Tulang Bawang Barat, pemerintah cenderung mendominasi proses perencanaan

sementara masyarakat dan akademisi berada di posisi reaktif. Kondisi ini membuat inovasi bottom-up sulit menembus jalur kebijakan formal.

Kearifan lokal masyarakat Lampung khususnya sistem pengelolaan sumber daya alam berbasis marga dan tradisi ritual yang terkait dengan ekologi memiliki potensi yang sesungguhnya besar sebagai basis produk wisata yang otentik dan berbeda. Penelitian Sumarmi dan Amirudin (2014) menunjukkan bahwa destinasi wisata yang mengintegrasikan kearifan lokal secara genuin mampu mempertahankan loyalitas wisatawan lebih baik dibandingkan destinasi berbasis atraksi buatan. Namun, integrasi itu mensyaratkan komitmen masyarakat yang tidak bisa dibangun hanya melalui program satu musim.

Peran akademisi dalam konteks ini menjadi strategis namun terkendala oleh struktur keterlibatan yang episodik. Dua perguruan tinggi yang dilibatkan dalam program desa wisata Panaragan Jaya terlibat melalui skema KKN Tematik dan hibah penelitian, keduanya bersifat sementara dan tergantung pada siklus akademik. Maturbongs, Edoardus E (2020) berargumen bahwa model Pentahelix hanya bisa bekerja efektif jika keterlibatan akademisi diinstitusionalisasi dalam bentuk kontrak riset aksi jangka menengah, bukan sekadar proyek ad hoc.

Media sebagai aktor Pentahelix kelima menunjukkan peran yang ambivalen. Di satu sisi, liputan Festival Nuwou Sesat oleh media lokal dan konten media sosial yang disebar oleh pengunjung berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kunjungan. Di sisi lain, tidak ada mekanisme yang memastikan akurasi dan konsistensi narasi wisata yang diproduksi. Beberapa konten media sosial yang viral justru mempromosikan atraksi yang belum siap menerima kunjungan massal, sehingga menimbulkan pengalaman wisata yang mengecewakan. Hal ini memperkuat perlunya koordinasi konten antara pengelola destinasi dan media, seperti yang diusulkan Carayannis dan Campbell (2009) dalam kerangka sistem inovasi Pentahelix.

Hambatan struktural yang paling sering disebut informan adalah keterbatasan anggaran Dinas Pariwisata yang pada tahun 2023 hanya sebesar Rp 3,2 miliar atau kurang dari 1,5% dari total APBD kabupaten. Angka ini jauh di bawah rata-rata nasional yang direkomendasikan untuk kabupaten dengan potensi wisata sedang (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2022). Tanpa peningkatan alokasi anggaran yang memadai, program kolaborasi lintas aktor sulit memiliki keberlanjutan karena hampir semua kegiatan lapangan bergantung pada inisiatif volunteer dari masyarakat dan mahasiswa KKN.

KESIMPULAN

Kolaborasi Pentahelix di Kabupaten Tulang Bawang Barat menunjukkan potensi yang nyata dalam mendorong pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis kearifan lokal, namun masih menghadapi hambatan struktural yang cukup serius. Kolaborasi yang berlangsung saat ini sebagian besar bersifat informal, tergantung pada relasi personal, dan tidak didukung oleh mekanisme koordinasi formal yang mengikat seluruh aktor secara setara. Akibatnya, capaian program bersifat parsial dan rentan terhadap pergantian kepemimpinan daerah atau habisnya periode hibah penelitian.

Kearifan lokal masyarakat Lampung meliputi tradisi budaya, sistem adat, dan pengetahuan ekologi lokal terbukti menjadi daya tarik wisata yang autentik dan dapat menjadi keunggulan komparatif Tulang Bawang Barat di tengah persaingan destinasi wisata di Provinsi Lampung. Namun, kearifan lokal ini hanya dapat berfungsi sebagai aset wisata yang berkelanjutan apabila masyarakat benar-benar ditempatkan sebagai subjek pengambil keputusan, bukan sekadar penampil dalam atraksi wisata.

Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas model Pentahelix dalam konteks pemerintahan daerah dengan kapasitas kelembagaan terbatas membutuhkan, pertama, formalisasi hubungan antaraktor melalui regulasi daerah atau perjanjian kerja sama yang terukur; kedua, peningkatan kapasitas masyarakat lokal secara sistematis dan berkelanjutan; serta ketiga, peningkatan alokasi anggaran pariwisata daerah yang proporsional dengan potensi yang dimiliki. Tanpa ketiga prasyarat ini, kolaborasi Pentahelix akan tetap berhenti pada level wacana kebijakan.

REKOMENDASI

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa rekomendasi diajukan kepada pemangku kepentingan terkait. Pertama, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat perlu menyusun Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati yang secara eksplisit mengatur mekanisme koordinasi Pentahelix dalam tata kelola pariwisata, termasuk pembentukan forum multipihak pariwisata yang bertemu secara reguler dan memiliki kewenangan untuk merekomendasikan kebijakan kepada bupati. Kedua, Dinas Pariwisata perlu mendorong alokasi APBD untuk sektor pariwisata mendekati minimal 2% dari total belanja daerah, dengan prioritas pada pembangunan infrastruktur dasar destinasi yang belum berkembang dan penguatan SDM pokdarwis. Ketiga, perguruan tinggi mitra khususnya yang memiliki program studi administrasi publik, manajemen pariwisata, dan komunikasi perlu mengembangkan skema kemitraan jangka menengah (minimal tiga tahun) dengan Dinas Pariwisata dan komunitas adat

lokal, bukan sekadar program KKN satu semester. Keempat, pengelola media lokal dan komunitas konten kreator daerah perlu dilibatkan dalam penyusunan narasi wisata resmi kabupaten, agar publikasi yang beredar di ruang digital mencerminkan kondisi aktual destinasi dan mendukung pengelolaan ekspektasi wisatawan.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang Barat. (2023). Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam angka 2023. BPS Kabupaten Tulang Bawang Barat. <https://tulangbawangbaratkab.bps.go.id>
- Carayannis, E. G., & Campbell, D. F. J. (2009). 'Mode 3' and 'Quadruple Helix': Toward a 21st century fractal innovation ecosystem. *International Journal of Technology Management*, 46(3–4), 201–234. <https://doi.org/10.1504/IJTM.2009.023374>
- Carayannis, E. G., Barth, T. D., & Campbell, D. F. J. (2012). The Quintuple Helix innovation model: Global warming as a challenge and driver for innovation. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.1186/2192-5372-1-2>
- Carbone, G. (2005). Civil society and democratisation in Africa. *European Journal of Development Research*, 17(4), 585–622. <https://doi.org/10.1080/09578810500370526>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Maturbongs, Edoardus E. (2020). Kolaborasi Model Pentahelix Dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal Di Kabupaten Merauke. *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v3i1.866>
- Hermawan, H. (2017). Dampak pengembangan desa wisata Nglanggeran terhadap ekonomi masyarakat lokal. *Jurnal Pariwisata*, 4(2), 105–117. <https://doi.org/10.31311/jp.v4i2.2179>
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2022). Pedoman pengembangan desa wisata berbasis kearifan lokal. Kemenparekraf RI. <https://www.kemenparekraf.go.id>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Nugroho, I., & Dahuri, R. (2012). *Pembangunan wilayah: Perspektif ekonomi, sosial dan lingkungan*. LP3ES.

- Ruhanen, L., Scott, N., Ritchie, B., & Tkaczynski, A. (2010). Governance: A review and synthesis of the literature. *Tourism Review*, 65(4), 4–16. <https://doi.org/10.1108/16605371011093836>
- Sumarmi, & Amirudin, A. (2014). *Pengelolaan lingkungan berbasis kearifan lokal*. Aditya Media Publishing.
- UNWTO. (2019). *Tourism and the sustainable development goals – Journey to 2030*. World Tourism Organization. <https://doi.org/10.18111/9789284419401>